

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLMAN

Muh. Fuad Randy¹, Astuty Hasti²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar
Email : fuadypup@gmail.com¹, astuty.hasti@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah SKPD Kabupaten POLMAN yang mencakup Pejabat Penatausahaan keuangan, Staff PPK, Kasubang Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Staff Bagian Akuntansi di SKPD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Abstract

This study aims to determine the effect of the quality of human resources and information technology on the application of accrual-based government accounting standards. The analytical tool used is multiple linear regression. The sample of this research is the SKPD of POLMAN Regency which includes Financial Administration Officers, PPK Staff, Head of Finance Subang, Expenditure Treasurer, Accounting Section Staff in SKPD. The results of this study indicate that the variable quality of human resources and information technology has a positive effect on the application of accrual-based government accounting standards.

Keywords: Accrual-Based Government Accounting Standards

PENDAHULUAN

Kualitas teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penyajian keuangan daerah (Elsye, *et.al.* 2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan diubah menjadi Peraturan Dalam Negeri No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan bagian ketiga Pasal 4 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keandalan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Standar Akuntansi pemerintahan yang merupakan pedoman untuk melakukan penerapan akuntansi berbasis akrual, sedangkan Perda tahun 2016 yang

menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar. Akuntansi Pemerintah (SAP) yang batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (full akrual) adalah tahun 2015. Perubahan yang sangat nyata dengan SAP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 adalah diwajibkan pengguna akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah untuk penerimaan termasuk penerimaan daerah yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 No. 64 tahun 2013 yang menyatakan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan elemen dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Penerapan akuntansi berbasis akrual termasuk pada tingkat pemerintah daerah adalah merupakan bagian dari reformasi mengenai suatu publik yang lebih luas dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi akuntansi sektor publik dan akuntansi publik di semua tingkat pelaporan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menerapkan akuntan akrual yaitu pertanggungjawaban kinerja pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar. Akuntansi Pemerintah (SAP) yang batas waktu penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara penuh (full akrual) adalah tahun 2015. Perubahan yang sangat nyata dengan SAP sebelumnya yang diatur dalam Peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 adalah diwajibkan pengguna akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah untuk penerimaan termasuk penerimaan daerah yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Penggunaan teknologi yang andal, sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Obyek dalam penelitian ini adalah kantor Pemerintah Kabupaten Polman, yang memiliki misi yakni meningkatkan pelayanan hak dasar masyarakat di bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia. Alasan peneliti memilih kantor Pemerintah Kabupaten Polman karena dari hasil opini audit yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Sulawesi Barat selama 3 tahun terakhir (2018 s/d 2020) memiliki opini yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Melihat kondisi ini dapat dikatakan dalam penyusunan laporan keuangan telah memberikan hasil yang memuaskan. Namun kondisi ini tidak sejalan dengan yang ditargetkan oleh kantor Pemerintah Kabupaten Polman.

Fenomena lapangan di atas menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, dimana yang diharapkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual harus dilakukan sejalan dengan UU. No. 71 tahun 2010, SAP berbasis akrual harus diterapkan oleh setiap entitas. Kenyataan dari yang diharapkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Polman selama ini bahwa dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual yang terjadi selama ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan aktivitas menerapkan akuntansi berbasis akrual. Dan selain itu sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem informasi akuntansi masih rendah sehingga mempengaruhi ketepatan dalam penyelesaian penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Rumusan

Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Polman. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Polman.

New Public Management (NPM) adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management*. NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Teori *New Public Management* (NPM), yang didasari dari pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2015:52) yang mengatakan bahwa akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengukur kinerja. Peran akuntansi dalam penerapan *new public management* adalah terkait dengan perlunya dilakukan perubahan sistem, permasalahan efisiensi, permasalahan akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen.

New Public Management (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. *New Public Management* tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. Bagi sementara orang, NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti *controlling*, *benchmarking* dan *lean management*; bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Tujuan *New Public Management* adalah untuk merubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga, walaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Akuntansi berbasis akrual berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan. *International Monetary Fund* (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun *Government Finance Statistics* (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis antara lain : 1. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. 2. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya. 3. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan. 4. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 5. Memungkinkan user untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya dan dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya. 6. Membantu user dalam pembuatan keputusan

tentang penyediaan sumber daya ke atau melakukan bisnis dengan entitas. 7. User dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Kemenkeu, 2014). Menurut PP 71 Tahun 2010 basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sesuai dengan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penerapan basis akrual adalah : a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. b. Investasi, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria. c. Aktiva tetap, untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria. d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP Modifikasi Akuntansi Berbasis Akrual.

Basis akuntansi ini meliputi pengakuan beberapa aktiva, namun tidak seluruhnya, seperti aktiva fisik, dan pengakuan beberapa kewajiban, namun tidak seluruhnya, seperti utang pensiun. Contoh bervariasi (modifikasi) dari akuntansi akrual, dapat ditemukan dalam paktek sebagai berikut ini : 1. Pengakuan seluruh aktiva, kecuali aktiva infrastruktur, aktiva pertahanan dan aktiva bersejarah/warisan, yang diakui sebagai beban (*expense*) pada waktu pengakuisisian atau pembangunan. Perlakuan ini diadopsi karena praktek yang sulit dan biaya yang besar untuk mengidentifikasi atau menilai aktiva-aktiva tersebut. 2. Pengakuan hampir seluruh aktiva dan kewajiban menurut basis akrual, namun pengakuan pendapatan berdasar pada basis kas atau modifikasi dari basis kas. Menurut (Heather Thomson, yang dikutip Arina, Devi dkk, 2014:5) terdapat tujuan penggunaan akuntansi basis akrual yaitu: 1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan) dalam sektor publik. 2. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. 3. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan. 4. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian tujuan penerapan akuntansi basis akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan dan sebagai alat pertanggungjawaban bukan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga keunggulan akuntansi kas yang sangat sederhana menyebabkan pemerintah enggan untuk pindah ke akuntansi akrual.

(Dikutip dalam Jurnal oleh Ratna Ayu Damayanti. 2013) Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010, Pemerintah akan menerapkan basis akuntansi akrual. Dalam basis akuntansi akrual, semua kejadian atau transaksi ekonomis yang berakibat atau berakibat keuangan diakui baik melibatkan transaksi pembayaran dan penerimaan tunai maupun tidak.

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Halim dan Kusufi (2013:225), Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Menurut Anggota IKAPI (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP. Akuntansi berbasis akrua adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrua, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Walaupun basis akrua berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) ini, entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas menuju Akrua paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, SAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

1. Kualitas sumber daya Manusia. Perkembangan sumber daya manusia di satu pihak dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan kerja manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam masyarakat. Di pihak lain pembinaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan usaha peningkatan taraf hidup. Adirianto dan Riharjo (2017) hasil penelitiannya menemukan bahwa

sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual. Begitu pula dengan Pratiwi (2016) yang menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia merupakan kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang tersimpan dan tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya.

2. **Teknologi Informasi.** Teknologi Informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak komputer). Secara sederhana, Pengertian Teknologi Informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Menurut Mulyadi (2014: 21) adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi. Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru dari pada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Krumwiede, 1998 dalam Kusuma, 2013). Indikator pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dari : 1, Sistem manajemen informasi. 2. Sistem SAP pada perangkat lunak. 3. Pelatihan penggunaan perangkat lunak.

METODE PENELITIAN.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Polman di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Polamas, Sulawesi Barat. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam merampungkan penelitian ini adalah kurang lebih dua bulan yakni dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yaitu : Data kualitatif, yaitu data yang sifatnya tertulis maupun lisan dalam rangkaian kata-kata atau kalimat secara tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti data mengenai kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah hasil kuesioner untuk jawaban masing-masing variabel. Adapun sumber data dalam yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari: Data primer yang diperoleh bersumber dari hasil penelitian lapangan melalui kuesioner yang disebar kepada responden, serta data lainnya yang menunjang penelitian ini. Data Sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain. Data. Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini maka diperlukan adanya data atau informasi baik dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden dalam hal ini adalah pegawai Kantor

Pemerintah Daerah Polman dengan cara sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Kuesioner. Metode Analisis Data dilakukan setelah data penelitian dari seluruh responden dikumpulkan dan disusun melalui instrumen penelitian yang berupa kuesioner. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan nilai factor loading >,0,30. Berikut hasil nilai factor loading pada setiap variable sebagai berikut : 1. Kapasitas Pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil nilai factor loading yang didapat, dari 6 butir pertanyaan yang diajukan menunjukkan hasil sebagai berikut : pertanyaan butir 1 sampai 6 dinyatakan valid karena factor loading yang dihasilkan lebih besar dari 0,30 yaitu yang didapat 0,319, 0,565, 0,443, 0,573, 0,429, 0,470.

Tabel
Uji Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia
Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TOTALX1
X1.1	Pearson Correlation	1	-.103	-.094	.238	.073	-.021	.319*
	Sig. (2-tailed)		.517	.553	.129	.647	.894	.039
	N	42	42	42	42	42	42	42
X1.2	Pearson Correlation	-.103	1	-.078	.331*	.177	.222	.565**
	Sig. (2-tailed)	.517		.626	.032	.263	.158	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X1.3	Pearson Correlation	-.094	-.078	1	-.031	.247	.025	.443**
	Sig. (2-tailed)	.553	.626		.846	.115	.877	.003
	N	42	42	42	42	42	42	42
X1.4	Pearson Correlation	.238	.331*	-.031	1	-.078	.322*	.573**
	Sig. (2-tailed)	.129	.032	.846		.623	.037	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
X1.5	Pearson Correlation	.073	.177	.247	-.078	1	-.265	.429**
	Sig. (2-tailed)	.647	.263	.115	.623		.090	.005
	N	42	42	42	42	42	42	42
X1.6	Pearson Correlation	-.021	.222	.025	.322*	-.265	1	.470**
	Sig. (2-tailed)	.894	.158	.877	.037	.090		.002
	N	42	42	42	42	42	42	42
TOTAL X1	Pearson Correlation	.319*	.565**	.443**	.573**	.429**	.470**	1
	Sig. (2-tailed)	.039	.000	.003	.000	.005	.002	
	N	42	42	42	42	42	42	42

Sumber : Hasil analisis Data

1. Kapasitas Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. Hasil nilai factor loading yang didapat, dari 6 butir pertanyaan yang diajukan menunjukkan hasil sebagai berikut : pertanyaan butir 1 sampai 6 dinyatakan valid karena factor loading yang dihasilkan lebih besar dari 0,30 yaitu yang didapat 0,379, 0,368, 0,337, 0,464, 0,394, 0,697.

Tabel 2
Uji Validitas Kapasitas Teknologi Informasi
Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	TOTAL X2
X2.1	Pearson Correlation	1	-.063	.090	-.010	-.030	.196	.379*
	Sig. (2-tailed)		.693	.573	.947	.853	.212	.013
	N	42	42	42	42	42	42	42
X2.2	Pearson Correlation	-.063	1	-.244	.426**	-.239	.134	.368*
	Sig. (2-tailed)	.693		.119	.005	.128	.397	.017
	N	42	42	42	42	42	42	42
X2.3	Pearson Correlation	.090	-.244	1	-.129	.189	.064	.337*
	Sig. (2-tailed)	.573	.119		.417	.230	.686	.029
	N	42	42	42	42	42	42	42
X2.4	Pearson Correlation	-.010	.426**	-.129	1	-.266	.168	.464**
	Sig. (2-tailed)	.947	.005	.417		.089	.287	.002
	N	42	42	42	42	42	42	42
X2.5	Pearson Correlation	-.030	-.239	.189	-.266	1	.231	.394**
	Sig. (2-tailed)	.853	.128	.230	.089		.142	.010
	N	42	42	42	42	42	42	42
X2.6	Pearson Correlation	.196	.134	.064	.168	.231	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.212	.397	.686	.287	.142		.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
TOTALX2	Pearson Correlation	.379*	.368*	.337*	.464**	.394**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.013	.017	.029	.002	.010	.000	
	N	42	42	42	42	42	42	42

Sumber : Hasil analisis Data

1. Kapasitas Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua. Hasil nilai factor loading yang didapat, dari 6 butir pertanyaan yang diajukan menunjukkan hasil sebagai berikut : pertanyaan butir 1 sampai 6 dinyatakan valid karena factor loading yang dihasilkan lebih besar dari 0,30 yaitu yang didapat 0,524, 0,531, 0,591, 0,465, 0,517, 0,487.

Tabel 3
Uji Validitas Kapasitas Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTALLY
Y1	Pearson Correlation	1	.179	.158	-.043	.124	.162	.524**
	Sig. (2-tailed)		.256	.319	.786	.435	.305	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y2	Pearson Correlation	.179	1	.148	.049	.138	.212	.531**
	Sig. (2-tailed)	.256		.349	.758	.383	.178	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y3	Pearson Correlation	.158	.148	1	.149	.208	.131	.598**
	Sig. (2-tailed)	.319	.349		.345	.186	.409	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y4	Pearson Correlation	-.043	.049	.149	1	.175	.137	.465**
	Sig. (2-tailed)	.786	.758	.345		.267	.388	.002
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y5	Pearson Correlation	.124	.138	.208	.175	1	-.043	.517**
	Sig. (2-tailed)	.435	.383	.186	.267		.789	.000
	N	42	42	42	42	42	42	42
Y6	Pearson Correlation	.162	.212	.131	.137	-.043	1	.487**
	Sig. (2-tailed)	.305	.178	.409	.388	.789		.001
	N	42	42	42	42	42	42	42
TOTAL Y	Pearson Correlation	.524**	.531**	.598**	.465**	.517**	.487**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.002	.000	.001	
	N	42	42	42	42	42	42	42

Sumber : Hasil analisis Data

Uji Reabilitas

Hasil uji reabilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada tabel

Tabel 4. Uji Reabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.671	18

Sumber : Hasil analisis Data

Dari tabel output di atas diketahui *N of item* ada 18 buah item dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,671. Nilai *Cronbach's Alpha* 0,60. Maka dalam pengujian uji reabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan angket untuk variable “penerapan akuntansi berbasis akrual” adalah *reliable* atau konsisten.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada table 5

Tabel 5. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.31870437
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.644
Asymp. Sig. (2-tailed)		.801

sumber : Hasil analisis Data

Pada tabel di atas nilai *Absolute* 0,074. Apabila dibandingkan dengan *Kolmogorov* tabel pada sampel $N = 42$ yaitu 0,096, maka $0,074 < 0,096$ yang berarti data berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji probabilitas pada spss yaitu pada nilai *Asymp. Sig. (2 tailed)* nilainya 0,801 di mana $> 0,05$ yang artinya data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji Multikolinieritas menggunakan nilai *Unstandardized Coefficients* dapat dilihat pada table 6

Tabel 6. Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.059	2.496		.825	.414		
X1	.641	.090	.665	7.102	.000	.916	1.091
X2	.324	.090	.338	3.614	.001	.916	1.091

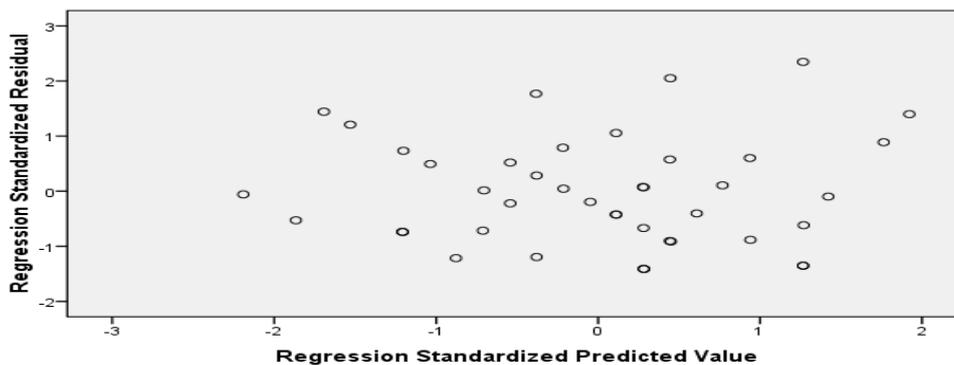
Sumber : Hasil analisis Data

Pada table di atas nilai Tolerance Variabel SDM (X1) dan Teknologi (X2) yakni 0,916 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai VIF yakni 1,091 lebih kecil dari 10.000. sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji Multikolinieritas menggunakan nilai Unstandardized Coefficients dapat dilihat pada table 7

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian seperti tampak pada output spss di atas dapat dilihat bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas artinya model regresi ini sudah baik.

Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Hasil Analisis Regresi Berganda menggunakan nilai Unstandardized Coefficients dapat dilihat pada table 8

Tabel 8. Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.059	2.496		.825	.414
X1	.641	.090	.665	7.102	.000
X2	.324	.090	.338	3.614	.001

Sumber : Hasil analisis Data

Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi t untuk variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa X1 diterima, yang berarti bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan Akuntansi berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Polman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh maka peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan pengembangan dalam penelitian ini dengan meneliti di kabupaten yang berbeda untuk dijadikan bahan perbandingan dan menambah variabel yang mendukung pemerintahan dalam mempersiapkan kebijakan yang berlaku.

Saran

Bagi SKPD Kabupaten Polman disarankan agar dapat memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang intensif bagi seluruh SKPD yang ada untuk mematangkan, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diberlakukan penuh pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir dan Terra Ch, Triwahyuni, 2015. *Pengenalan Teknologi Informasi* Penerbit Andi, Yogyakarta
- Arina, Devi dkk. 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual Seminar Akuntansi Pemerintah*. STAN.
- Damayanti, et all. 2013. *Akuntansi Akrual Dan Penerapannya Di Sektor Publik*. Sebuah Agenda Pembaruan

Elsye Rosmery, 2014, *Dasar-dasar Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah, cetakan pertama*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Endang Kristiawati, (2015) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat*. Jurnal Akuntabilitas Vol. VIII No 3, Desember 2015 P-ISSN : 1979-858X Halaman 171–190. Vol. VIII No. 3, Desember 2015

Evita Puspitasari, (2016) *Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Pemerintah Daerah*. Jurnal Keuangan dan Bisnis V, Th. 2016. ISBN.

Halim, A., & Kusufi, M. S. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit : Salemba Empat. Jakarta

Kamemy, Laraswisesa, 2017, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah Provinsi Riau* (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau). Jurnal JOM Fekon, Vol.4, No. 1 (Februari) 2017.

Kusuma, Muhammad Indra Yudha dan Fuad, 2013, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi AkruaI pada Pemerintah*. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 2, No. 3, tahun 2013, ISSN : 2337-3806.

Kusuma, Ririz Setiawati., 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI (Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jember)*. Jurnal

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, edisi ketiga, cetakan ke-1, UTP STIM YKPN*, Yogyakarta

Mulyadi. 2014. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) *Akuntansi Basis akruaI*

Sutabri, Tata. 2014. *Analisa Sistem Informasi*. Penerbit : Andi, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.